

6

Narasi Emik Regsosek Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala

Arditya Wicaksono & Tedi Gunawan

A. Merekam Realita: Pendataan Regsosek di Bumi Sulawesi Tengah

Pembaruan data untuk perlindungan sosial secara periodik mutlak perlu dilakukan karena setiap *stakeholder*, baik itu pemerintah maupun NGO, memiliki program-program sosial yang membutuhkan data terkini agar program yang mereka kerjakan tepat sasaran (Randall dkk., 2015). Pemutakhiran data perlindungan sosial terakhir kali dilakukan pada tahun 2015, dan hingga saat ini data tersebut masih digunakan oleh Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lainnya dalam menyalurkan bantuannya. *Updating* data tahun 2015 sudah berulang kali dilakukan oleh kementerian terkait, tetapi hasil evaluasi menunjukkan bahwa program bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah sering kali tidak tepat sasaran karena dinamika penduduk Indonesia yang sangat tinggi. Data yang ada pada setiap kementerian

A. Wicaksono & T. Gunawan

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: ardi013@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Wicaksono, A. & Gunawan, T. (2023). Narasi emik regsosek Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (215–259). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c699 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

tidak berasal dari sumber data yang sama sehingga ketika terjadi bencana alam atau pandemi seperti COVID-19, pemerintah tidak bisa fokus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dikarenakan setiap penduduk memiliki level kesejahteraan yang berbeda-beda berdasarkan data kementerian dan lembaga masing-masing. Data yang berasal dari pendataan Regsosek 2022 ini diharapkan dua tujuan negara dapat tercapai. *Pertama*, tersedianya data perlindungan sosial untuk seluruh penduduk Indonesia; dan *kedua*, tersedianya satu data untuk data perlindungan sosial yang bisa digunakan oleh seluruh *stakeholder*.

Seperti yang telah diketahui, pada rentang waktu 15 Oktober hingga 14 November 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Tujuan dari pendataan Regsosek adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk. Dalam hal ini, Regsosek bertujuan untuk membentuk satu data kependudukan tunggal yang dapat diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi (BPS, 2022). Data Regsosek di masa depan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah, seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan Regsosek di Sulawesi Tengah secara umum berjalan dengan lancar. Sebelum dimulai, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022 yang dimaksudkan menyatukan langkah dalam mendukung proses pendataan profil kependudukan di Sulawesi Tengah. *Support* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah upaya mendukung, mengawal, dan mengapresiasi pelaksanaan Regsosek tahun 2022. Dukungan terhadap kegiatan Regsosek ini menjadi penting sebab permasalahan validasi dan akurasi data sering kali ditemukan dan menjadi persoalan dalam perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan sosial. Setiap program pemberdayaan serta perlindungan sosial bagi masyarakat tidak berjalan secara optimal

bila data yang tersedia tidak akurat. Oleh karena itu, dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pendataan sosial ekonomi masyarakat ini penting dan bernilai strategis. Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencerminkan profil keluarga secara menyeluruh dan diharapkan dapat menghasilkan data terpadu yang menjadi panduan dalam program pemerintah.

Proses kegiatan pendataan awal Regsosek di Sulawesi Tengah, terutama di daerah-daerah pinggiran dan komunitas suku di dalam hutan menimbulkan tantangan yang signifikan karena daerah-daerah tersebut sering kali sulit diakses dan kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Salah satu tantangan utama dalam melakukan pendataan Regsosek di daerah ini adalah kurangnya data kependudukan yang akurat dan terkini. Banyak dari wilayah ini belum disurvei atau dicatat secara menyeluruh dan akibatnya sulit untuk memperkirakan populasinya secara akurat, terutama di daerah pinggiran dan komunitas suku-suku yang tinggal di hutan. Hal ini dapat menyebabkan penghitungan yang kurang atau berlebihan yang dapat berdampak serius pada alokasi dan perencanaan sumber daya. Tantangan besar lainnya adalah kurangnya tenaga terlatih dan sumber daya untuk melakukan pendataan di daerah terpencil. Banyak dari daerah ini yang sulit dijangkau dan logistik untuk mendirikan pusat pencacahan Regsosek dan penempatan petugas Regsosek (PPL dan PML) dapat menjadi rumit dan mahal.

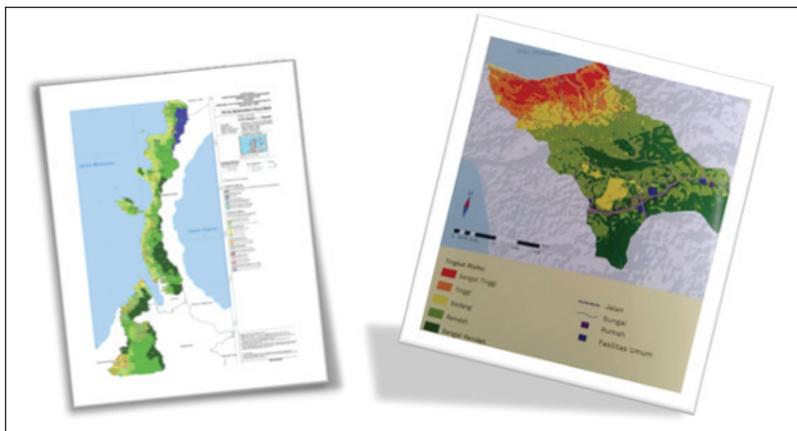
Penulis juga menemui beberapa hambatan sosial dan budaya yang mempersulit pelaksanaan Regsosek yang akurat. Banyak dari wilayah ini adalah rumah bagi kelompok etnis dan bahasa yang beragam (keturunan Arab, keturunan Tionghoa, suku pedalaman), masing-masing dengan adat dan tradisinya sendiri. Hal ini dapat mempersulit petugas untuk berkomunikasi secara efektif dengan penduduk setempat dan mengumpulkan data yang akurat. Selain itu, mungkin ada tabu budaya atau kepekaan seputar pertanyaan atau topik tertentu yang dapat menyebabkan ketidakakuratan data, misalnya beberapa kelompok komunitas mungkin ragu untuk membuka informasi tentang pendapatan rumah tangga mereka.

B. Limboro: Sebuah Dusun di Antara Kota dan Pinggiran

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61.841,29 km² (Basaria dkk., 2018). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Buol Toli-toli. Pada masa perkembangannya, beberapa kabupaten itu dimekarkan menjadi lebih banyak kabupaten. Sebagai kota tertua dan memiliki histori yang panjang di Sulawesi Tengah, tentu Kabupaten Donggala memiliki potensi pelabuhan dan perdagangan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, kabupaten yang berpusat di Kecamatan Banawa ini, potensi pelabuhan dan perdagangannya justru kalah bersaing dengan ibu kota provinsi, yakni Kota Palu, yang merupakan bekas pemekaran wilayahnya.

Perubahan administrasi pertama merujuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Tengah sekaligus pemekaran pertama saat sebagian wilayah daerah Kabupaten Donggala dibagi menjadi Kabupaten Donggala dan Toli-toli. Pemecahan wilayah kedua terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999, ibu kota Kabupaten Donggala resmi dipindahkan dari Kota Palu dikembalikan ke Kota Donggala sendiri yang berjarak sekitar satu jam perjalanan darat dari Kota Palu. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah membentuk pemekaran ketiga dari Kabupaten Donggala. Perubahan administrasi wilayah telah berlangsung tiga kali. Peta Kabupaten Donggala memperlihatkan ragam situasi geografis setempat (Gambar 6.1).

Kondisi Donggala yang minim perubahan tecermin dari persentase penduduk miskin di wilayah ini yang menempatkan Donggala sebagai daerah penyumbang tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi



Sumber: Perda Nomor 2 (2022)

Gambar 6.1 Peta Pola Ruang Kab. Donggala Desa Limboro

Tengah (BPS, 2020). Mayoritas warga Donggala yang berdomisili di Kota Palu sangat bergantung dengan perputaran ekonomi kota di sekitarnya. Kondisi seperti ini terlihat nyata di pusat pemerintahan, yakni Kecamatan Banawa yang relatif sepi sebab hilir mudik orang Donggala-Palu dilakukan saat pagi dan sore hari. Kurangnya akses penerangan jalan di jalur utama ruas jalan Donggala–Palu dan minimnya angkutan umum membawa cerita sepinya Donggala sebagai pusat aktivitas yang pernah menggeliat di masa lalu. Sepanjang jalur trans-Sulawesi banyak debu di sepanjang jalan akibat penambangan pasir menambah keengganan warga melintas jalur Palu dan Donggala. Upaya manual mengatasi kendala tersebut sudah dilakukan, yakni dengan pembersihan dan penyiraman setiap hari. Namun, hal ini dirasa belum optimal mengatasi kendala di jalan tersebut.

Pertanian menjadi sumber utama pendapatan penduduk Donggala. Hasil pertanian daerah terdiri dari kelapa, kakao, dan cengkih (Kaunang dkk., 2016). Ketiganya merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini. Sumber pendapatan petani lainnya berasal dari hasil hutan, seperti rotan serta berbagai macam kayu, yaitu agatis, eboni, dan meranti (Abubakar dkk., 2013). Penggembalaan ternak sapi, kerbau, dan kambing yang dipelihara lepas (tanpa kan-

dang) menjadi ciri khas masyarakat di sana. Peternakan dengan pola ini menyebabkan banyak persoalan baru terkait kebersihan dan kenyamanan. Berbagai pengaturan terkait pola penggembalaan ternak sudah diupayakan oleh pemerintah. Namun, hal ini dirasa belum efektif akibat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang minim. Persoalan mendasar adalah minimnya kepemilikan kandang dan luas kepemilikan tanah yang terbatas membuat pemandangan hewan ternak berkeliaran di sekitar menjadi sangat lazim dan biasa.

Menyusuri belasan kilometer ke arah selatan dari Kota Donggala, penulis sampai pada Kecamatan Banawa Tengah yang memiliki delapan desa, yang salah satu di antaranya Desa Limboro. Topografi desa ini sangat bervariasi, mulai dari dataran tinggi di sebelah selatan hingga dataran rendah yang berbatasan langsung dengan lautan di pesisir utara. Berdasarkan data administrasi desa tahun 2020 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Desa Limboro adalah 661,2 hektare (Pemerintah Desa Limboro, 2022). Desa ini berada di ujung Kabupaten Donggala dan dapat ditempuh melalui jalan darat sepanjang 12,5 km dari ibu kota Kabupaten Donggala atau 40 km jika berangkat dari pusat Kota Palu. Transportasi yang dapat digunakan adalah kendaraan roda dua dan mobil dengan kondisi jalan sempit, berliku, serta menanjak.

Sepanjang perjalanan, pengendara akan disuguhi pemandangan birunya Teluk Palu dan Selat Makassar pada sisi sebelah kanan. Pemandangan tidak kalah menarik juga ditampilkan di sisi kiri karena terdapat hamparan perbukitan hijau yang memanjang. Namun sayangnya, di beberapa lokasi perbukitan, saat ini sudah berubah menjadi lahan gersang dikarenakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan galian C yang aktivitasnya tidak hanya merusak alam, tetapi juga menyebabkan pasir dan kerikil sisa tambang berserakan di jalanan utama. Aktivitas pertambangan menyebabkan debu beterbangan di udara dan mengakibatkan beberapa ruas jalan menjadi rusak. Pengemudi yang melintasi jalan ini perlu lebih waspada dalam perjalanan. Jika tidak hati-hati, para pengendara, terutama roda dua, mungkin jatuh tergelincir karena pasir dan akan berhadapan langsung dengan truk-truk besar pengangkut material tambang.

Dengan hiruk pikuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di seberang lautan, aktivitas pertambangan di sepanjang jalan Palu–Donggala menuju Desa Limboro makin hari makin meningkat. Ada baiknya jika orang yang memang tidak familier dengan kondisi jalan di sini, disarankan untuk menyewa mobil sekaligus sopirnya dari Kota Palu. Hal ini disebabkan sarana transportasi umum yang melayani dari dan ke Desa Limboro sendiri hanyalah angkutan umum yang jumlahnya sedikit. Transportasi umum ini juga hanya beroperasi pada siang hari, sedangkan malam hari tidak ada angkutan umum yang beroperasi dikarenakan tidak ada supir yang berani mengambil risiko.

Pada umumnya, seperti wilayah perdesaan lain di Indonesia, nuansa kehidupan agraris masih sangat terasa di Desa Limboro. Sebagian besar kegiatan pertanian Desa Limboro dilakukan di lahan kering. Tanah ini selain dapat digunakan untuk persawahan, juga dapat digunakan untuk pekarangan, bangunan rumah maupun kandang, kebun, ladang atau huma, padang penggembalaan, dan berbagai manfaat lainnya. Penggunaan lahan untuk ladang menyumbang sebagian besar dari total pemanfaatan lahan kering. Tanaman pangan seperti beras serta tanaman hortikultura dan palawija merupakan hasil pertanian utama di desa ini. Tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian, dan tidak lupa beras, secara lugas turut menggerakkan perekonomian desa ini di samping sektor perikanan. Selain pertanian, beberapa warga juga memelihara ternak. Ternak utama masyarakat adalah unggas, baik ayam kampung maupun ras, serta ternak lainnya seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba.

Berbicara mengenai demografi, berdasarkan data basis Desa Limboro tahun 2022, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.089 orang yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1.054 orang dan perempuan 1.035 orang (Pemerintah Desa Limboro, 2022). Keseluruhan jumlah penduduk di desa ini terdiri atas 598 kepala keluarga. Mayoritas suku yang mendiami desa ini adalah suku Kaili Unde dan suku Kaili Unde Puu. Masyarakat Unde sendiri dapat ditemui di wilayah Kecamatan Ulujadi Kota Palu, masing-masing di Kelurahan Watusampu, Buluri. Masyarakat sebagian besar menyebar

di wilayah Kabupaten Donggala, termasuk Desa Limboro. Bahasa lokal yang digunakan adalah bahasa Kaili Unde dan Unde Puu.

Desa Limboro terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Satu, Dua, Tiga, Empat, dan Lima. Di beberapa dusun, seperti Dusun Lima Apumpae, beberapa warga suku Kaili masih tinggal di rumah-rumah tradisional yang disebut *sapo* dan *sou*. Rumah *sapo* merupakan rumah yang berdiri di tengah permukiman warga, sedangkan rumah *sou* adalah sebutan rumah yang berada di dalam areal perkebunan. Kedua rumah ini adalah sejenis rumah panggung yang sebagian besar rangkanya menggunakan kayu. Sementara itu, untuk dinding menggunakan papan kayu dari pohon kelapa yang banyak ditemui di desa ini. Untuk atapnya sendiri, rumah jenis ini masih menggunakan jerami.

Untuk sektor pendidikan, fasilitas pendidikan terdiri dari dua jenjang Pendidikan, yaitu SDN 5 Banawa Tengah di Dusun Dua, SDN 11 Banawa Tengah di Dusun Lima, SMPN 1 Banawa Tengah di Dusun Satu, dan MTs Muhammadiyah Desa Limboro di Dusun Tiga (Pemerintah Desa Limboro, 2022). Para penduduk desa ini harus merantau ke Kota Palu dan sekitarnya apabila ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan SMA atau perguruan tinggi. Namun, hanya sebagian kecil dari para siswa ini yang dapat dan ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena rata-rata orang tua tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

Selain fasilitas pendidikan, desa ini juga memiliki fasilitas kesehatan berupa satu poskesdes dan dua posyandu. Posyandu di Desa Limboro memiliki empat kelompok. Nama kelompok posyandu di Desa Limboro adalah Kelompok Kenanga Satu terdiri dari Dusun Satu, Kenanga Dua terdiri dari Dusun Dua, Kenanga Tiga terdiri dari Dusun Tiga dan Dusun Empat, dan Kenanga Empat terdiri dari Dusun Lima. Dua gedung posyandu milik desa dimanfaatkan oleh dua kelompok saja, yaitu Kenanga Satu yang terletak di Dusun Satu dan Kenanga Empat yang terletak di Dusun Lima.

Kegiatan posyandu Kenanga Dua dilaksanakan di Banggoya dan posyandu Kenanga Tiga dilaksanakan di rumah Kepala Dusun Empat. Poskesdes terletak di Dusun Dua yang juga terdapat tempat tinggal bidan desa. Untuk aliran listrik, PLN sudah merambah ke sebagian besar rumah di Desa Limboro, tetapi penggunaan utamanya hanya untuk penerangan saja. Hanya sedikit orang yang memiliki akses listrik untuk digunakan dalam menghidupkan peralatan elektronik, seperti lemari es dan mesin cuci. Alat-alat tersebut masih dianggap sebagai barang mewah di desa ini, terutama di beberapa dusun seperti Dusun Lima Apumpae.

Penduduk Desa Limboro sendiri mayoritas beragama Islam. Kehidupan beragama di desa ini tidak lepas dari peranan penting dari ulama yang sudah aktif berdakwah sejak sebelum penjajahan Belanda, masa pemerintahan kolonial hingga pada masa pascakolonial. Tercatat pada abad ke-16, Islam mulai menancapkan pengaruhnya ke kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah (Syawal, 2019). Perkembangan pesat kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan menyebabkan penyebaran ajaran ini meluas hingga di provinsi ini. Daerah pesisir adalah tempat di mana Islam pertama kali mulai memengaruhi budaya lokal di Sulawesi Tengah, terutama di Donggala. Untuk fasilitas keagamaan, terdapat tiga masjid dan satu musala di Desa Limboro. Masjid besar Desa Limboro terletak di Dusun Tiga dengan nama Masjid Al-Munawarah. Di Dusun Lima terdapat Masjid Ar-Rahman dan di Dusun Satu ada Masjid Jabal Nur yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Satu Musala terletak di Dusun Lima yang berada di pesisir pantai Kaluku. Desa Limboro sendiri tidak memiliki sarana dan prasarana ibadah agama yang lain karena menurut data yang ada, semua penduduknya beragama Islam.

Salah satu alasan memilih desa ini menjadi fokus penelitian adalah Desa Limboro merupakan daerah rawan bencana alam di mana pada 28 September 2018 pukul 08.00 Wita gempa bumi berkekuatan 7,4 SR mengguncang daerah Donggala, Palu, dan sekitarnya. Desa ini termasuk lokasi yang porak poranda dilanda gempa. Selain itu juga, merujuk data BPS setiap tahun, Desa Limboro, khususnya Dusun Lima

Apumpae, selalu masuk dalam kategori miskin dan dikenal memiliki aksesibilitas wilayah yang kurang baik di mana untuk menuju ke dusun ini diperlukan perjuangan karena medan yang berat dan tidak adanya penerangan jalan pada malam hari. Dusun Lima merupakan salah satu dusun yang tertinggal, di mana 130 kepala keluarga yang mendiami dusun tersebut didominasi penduduk mayoritas dengan rentang usia antara 25 sampai 30 tahun dan mayoritas kedua dengan rentang usia 50–55 tahun.

Menurut Kepala Dusun Lima Apumpae, Bapak Eman Juman, banyak hal yang harus dicarikan solusinya di dusun ini secara bersama-sama sebab mayoritas warga hanya berpendidikan SD sehingga sumber daya manusia yang ada dirasa kurang memadai. Minat anak usia sekolah untuk menamatkan sekolah minimal SMP juga tergolong rendah sebab, bukan karena biaya sekolah, tetapi karena biaya transportasi yang membebani dan harus ditanggung setiap hari untuk naik angkot karena jarak sekolah SMP membutuhkan biaya transportasi Rp10.000,00 per anak, sementara untuk sekolah SMA relatif lebih mahal lagi karena lebih jauh jaraknya dari desa. Menurut kepala dusun, mayoritas penduduk di sini memiliki pengeluaran setiap hari berkisar antara Rp25.000,00–Rp30.000,00 per hari. Kondisi ini yang membuat orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata masyarakat menginginkan anak-anak bekerja membantu orang tua untuk menambah penghasilan keluarga sebagai tukang pungut hasil ikan, pemetik kelapa, dan pengumpul kayu.

Kondisi kehidupan masyarakat di Dusun Lima Apumpae memang memerlukan perhatian khusus. Kondisi rumah warga beberapa masih beratapkan daun kelapa, berdinding kayu, dan berlantaikan tanah. Pascagempa 2018 telah tersalurkan bantuan rehabilitasi rumah dari dinas setempat sejumlah 50 unit sehingga beberapa rumah sudah berlantaikan ubin, bertembok dinding, dan beratap galvanis. Banyak yang menilai bantuan ini hanya mencakup sebagian warga saja, mengingat kondisi di lapang banyak warga yang sangat membutuhkan rehabilitasi rumah. Berdasarkan keterangan Bapak Kepala Dusun,

rehabilitasi rumah bantuan gempa diprioritaskan kepada warga yang sudah memiliki pondasi rumah sehingga program ini hanya dapat dinikmati sebagian kecil masyarakat karena rumah warga masih banyak yang belum berpondasi beton. Rata-rata rumah warga memiliki luas tanah kurang dari 60 meter persegi bahkan secara ekstrem rata-rata hanya 20–30 meter persegi saja. Di dusun ini juga diketahui masih jarang ditemui masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua sehingga mobilitas masyarakat juga sangat terbatas dan memerlukan perbaikan di sektor transportasi umum.

Dusun Lima Apumpae sesungguhnya sangat kaya akan potensi alam. Dusun ini banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa yang menurut penelusuran informasi ke warga, banyak pohon kelapa yang ditanam oleh warga ini bukan milik mereka lagi karena sudah dijual kepada orang luar dusun. Informasi ini terverifikasi oleh istri kepala desa, Suwartiningsing. Beliau mengatakan bahwa rata-rata penduduk telah menjual pohon kelapanya ke para tengkulak untuk dapat diproses menjadi bahan yang lebih bernilai ekonomi tinggi. Informasi terkait praktik penjualan pohon kepala kepada tengkulak sudah lama terjadi sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi masalah tersebut dan hanya menerima keadaan.

Sangat disayangkan pohon kelapa yang jumlahnya luar biasa banyak ini ternyata bukan milik warga, tetapi pohon tersebut sudah tergadaikan kepada orang lain yang bukan berasal dari dusun tersebut. Saat penulis ingin menelusuri kondisi ini lebih jauh, penulis terkendala harus menginterview siapa sebab banyak orang yang menyatakan praktik semacam ini sudah terjadi sejak generasi sebelumnya. Apabila ditanyakan kontribusi terhadap para pemilik pohon kelapa, berapa lama dapat memiliki pohon ini sampai kepada kondisi seperti apa praktik ini berakhir, tidak ada yang dapat menjawab termasuk Bapak Mohammad Kifli selaku kepala desa. Namun, yang bersangkutan mencoba melakukan penelusuran siapa pemilik pohon kelapa ini sesungguhnya.

Terkait instalasi listrik, tempat ini terkendala oleh jaringan dan medan yang sulit sehingga saat malam hari Dusun Apumpae sering

mati lampu, begitu juga halnya dengan aliran air. Aliran air PDAM di dusun ini memiliki banyak hambatan dikarenakan kondisi geografis yang cukup ekstrem. Tempat penampungan air yang dibangun oleh PDAM juga tidak optimal karena posisinya lebih tinggi dari pipa saluran air. Oleh karena itu, jaringan yang terbangun dengan kondisi yang ada tandon penampung air akan sulit untuk terisi penuh. Hal ini selain karena ketinggian, didapati juga tidak ada pompa pendorong air. Dari tiga tandon yang ada, hanya satu yang optimal sehingga kebutuhan MCK warga setiap hari juga bergantung pada persediaan air harian. Problem ini sudah diutarakan oleh warga dan perangkat desa sampai ke kecamatan, tetapi instalasi yang terbangun tidak sesuai harapan sehingga problem sanitasi MCK dan kebersihan di Dusun Lima Apumpae harus menjadi prioritas penanganan, setidaknya kehidupan keseharian masyarakat dapat berubah lebih baik, lebih sehat, dan lebih beradab.

Pengeluaran warga dari hasil pendataan ini terverifikasi rata-rata Rp30.000,00 per hari. Kondisi seperti itu biasanya digunakan untuk menyambung hidup saja. Warga hanya membeli beras saja, sedangkan sayur dan ikan biasanya didapatkan dari hasil sisa nelayan yang tidak terjual sehingga harganya murah. Sayur diperoleh dari tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar rumah. Perhatian untuk kondisi kesehatan juga dirasakan masih sangat kurang bila rujukannya adalah pengeluaran sebesar Rp30.000,00 per hari, akibatnya banyak warga yang tidak sanggup memperoleh fasilitas BPJS. BPJS di sini ada yang diperoleh dari program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesadaran akan kesehatan masyarakat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang berkunjung ke posyandu yang jaraknya sekitar 2 km. Persoalan kesehatan ini akan mencuat apabila warga memerlukan penanganan yang bersifat lebih dan harus dirujuk. Sayangnya, banyak di antara warga yang tidak aktif membayar iuran BPJS. Demikian juga, lokasi puskesmas yang ada fasilitas rawat inapnya cukup jauh sehingga memerlukan biaya tambahan.

C. Membumikan Standar Nasional ke Donggala

Pada tahun 2020–2021, pembangunan menghadapi kendala yang berat karena pandemi COVID-19. Dampaknya adalah ekonomi mengalami kontraksi, tingkat pengangguran meningkat, dan kemiskinan makin tinggi. Tantangan ini kemungkinan masih akan berlanjut hingga tahun 2022. Meskipun pengangguran dan kemiskinan menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 (BPS, 2022). Selain itu, tantangan di tahun 2022 juga meliputi kondisi global dampak perang Ukraina-Rusia terhadap kenaikan harga komoditas dunia. Kenaikan harga atau inflasi yang signifikan dapat berdampak pada peningkatan kemiskinan, terutama jika tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.

Dalam upaya mengatasi konsekuensi yang timbul akibat pandemi COVID-19, pemerintah telah merancang tiga reformasi struktural dalam Rencana Kerja tahun 2021 dan 2022. Reformasi tersebut meliputi sistem kesehatan, sistem kebencanaan, dan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Tujuan reformasi sistem perlindungan sosial adalah meningkatkan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial sehingga dapat memberikan manfaat secara tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif dalam menghadapi bencana, terutama bagi mereka yang rentan (BPS, 2022).

Untuk mereformasi sistem perlindungan sosial yang ada, ada enam prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat utama adalah melakukan transformasi data menuju satu data Regsosek untuk seluruh penduduk. Transformasi data ini dilakukan untuk mengubah penyediaan data sosial ekonomi yang awalnya bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Hal ini akan melibatkan beberapa perubahan dalam penyediaan data sosial ekonomi (BPS, 2022), termasuk (1) mencakup seluruh penduduk Indonesia; (2) menggunakan standar dan metodologi yang sama; (3) melakukan pemutakhiran secara rutin; (4) memudahkan akses; dan (5)

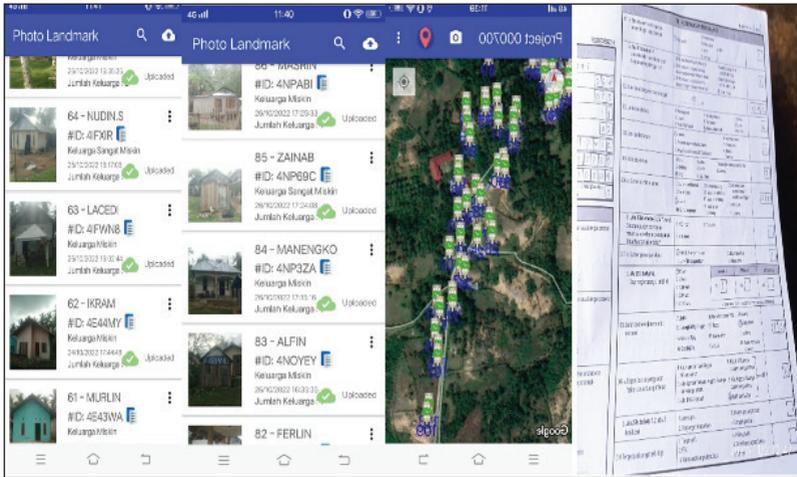


Foto: Arditya (2022)

Gambar 6.2 Verifikasi Faktual

membagikan data kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, transformasi data menuju Regsosek adalah kunci utama dalam mereformasi sistem perlindungan sosial karena hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan akurasi data sosial ekonomi yang digunakan untuk membangun kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Secara sederhana, dalam proses bisnis kegiatan pendataan awal Regsosek 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan dan level. Secara substansi, verifikasi secara faktual menjadi dasar dalam menjaga validitas data. Verifikasi data tergambar dari *tagging* spasial lokasi rumah warga (Gambar 6.2). Selanjutnya, koordinasi dan komunikasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari petugas pendataan lapangan (PPL) ke petugas pemeriksa lapangan (PML), koordinator sensus kecamatan (Koseka) ke BPS Kabupaten Kota, ke BPS Provinsi hingga Pusat, dan begitu pula sebaliknya. Dalam koordinasinya juga terdapat sistem pengawasan berbasis aplikasi dan website untuk evaluasi kinerja pekerja lapangan sehingga kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat dapat melihat progres kinerja secara *real time*. Oleh karena itu, proses

perekrutan mitra dan petugas lapangan diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing, termasuk dalam menentukan syarat dan kriteria petugas. Selain itu, untuk memudahkan proses koordinasi dan komunikasi, terdapat syarat khusus bagi enumerator, yaitu memiliki ponsel yang kompatibel dengan aplikasi Regsosek sehingga proses komunikasi dan pengawasan (validasi) diharapkan dapat terjaga.

Pengumpulan data awal dari Regsosek akan menghasilkan data yang terintegrasi tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga untuk semua program yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Regsosek berfungsi untuk memfasilitasi koordinasi dan pertukaran data antardaerah untuk memastikan penggunaan data yang konsisten. Tujuan dari pengumpulan data awal Regsosek adalah untuk menyediakan sistem dan basis data yang mencakup seluruh penduduk, termasuk profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan dan basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Regsosek mencakup informasi tentang kondisi sosial ekonomi, termasuk demografi, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya (BPS, 2022).



Foto: Arditya (2022)

Gambar 6.3 Diskusi Bersama BPS Kab. Donggala dan BPS Provinsi

Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Simon Sapary (Gambar 6.3) mengatakan bahwa Regsosek merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang salah satu prasyarat utamanya ialah transformasi data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat. Pendataan Regsosek ini diharapkan mampu memutakhirkan data sosial ekonomi sehingga dapat menangkap perubahan dinamika kesejahteraan masyarakat. Diharapkan data Regsosek yang dihasilkan dapat menjadi rujukan guna mengintegrasikan program perlindungan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat.

Fase implementasi awal terdapat ketidakjelasan dan keterlambatan informasi dari pemerintah pusat terkait dengan kegiatan Regsosek ini. Akibatnya, BPS Provinsi Sulawesi Tengah sempat mengira bahwa kegiatan Regsosek dibatalkan mengingat waktu yang sempit dan praktis tersisa 2–4 bulan. Proses perekrutan mitra dan petugas lapangan diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing dalam menentukan syarat petugas dan proses perekrutannya. Hanya saja ada syarat khusus, yaitu memiliki ponsel yang kompatibel dengan aplikasi Regsosek sehingga proses *upload* data ke aplikasi dapat berjalan baik. Perekrutan biasanya diutamakan bagi yang telah atau pernah mengikuti program sensus atau pencacahan oleh BPS semisal sensus penduduk, sensus pertanian, atau sensus ekonomi.

Apabila seleksi para petugas dirasa kurang maka proses rekrutmen dapat mempertimbangkan keterlibatan para perangkat desa/dusun dan warga setempat yang dinilai dan dirasa oleh kantor BPS memadai dan memiliki kecakapan serta amanah dalam menjalankan tugas pendataan di lapangan. Prasyarat ini menjadi sangat penting karena Regsosek ini benar-benar menyentuh sisi-sisi humanis manusia dan perlu kejelian dalam menggali informasi yang bersifat privasi dan terbatas. Partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah relatif tinggi, terutama di daerah perdesaan, sedangkan untuk daerah perkotaan justru kurang antusias karena faktor waktu dan kesibukan warga. Kegiatan Regsosek merupakan kegiatan kolaborasi antara beberapa kementerian dan BPS. BPS, baik itu pusat maupun daerah, pada kegiatan Regsosek ini hanya bertugas untuk melakukan

pengumpulan data dan penginputan. Data hasil entri kemudian akan disimpan dalam database. Pada masa mendatang harapannya ada satu data nasional yang terkonfirmasi, tervalidasi secara faktual, dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan isu kemiskinan dan kerentanan sosial.

Masyarakat, terutama kelompok rentan, secara umum mengira program ini hanya mengenai seputar masyarakat yang mendapat bantuan dan tidak sehingga masyarakat banyak yang berkeinginan untuk dikategorikan ke dalam kelompok rentan miskin sebagai akibat pandemi datau hanya dikarenakan warga ingin mendapatkan bantuan pemerintah secara berkelanjutan. Pada fase ini segenap jajaran BPS, Pemda, kecamatan, sampai pemerintahan desa dan petugas PPL dan PML diuji dalam penguasaan konsep dan pemahaman program secara langsung di lapangan, apakah benar datanya datau proses input di aplikasi sudah benar, seperti yang terlihat di Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala.

Fase ini boleh dibilang sangat krusial sebab tidak segelintir warga yang berharap bantuan, sementara kondisi warga sebenarnya tidak perlu bantuan. Di sisi lain, keterbatasan yang dimiliki warga Dusun Lima Apumpae sebagai lokasi penelitian memang memerlukan uluran tangan pemerintah atau selama ini hidupnya menggantungkan diri dari uluran program pemerintah. Di dusun inilah tergambar secara jelas bahwa proses registrasi ini dirasa membawa manfaat yang signifikan. Terlebih ketika latar belakang Dusun Lima sendiri memang rentan kemiskinan, rawan bencana gempa bumi dan tsunami, serta bencana alam lainnya seperti longsor dan banjir.

Apresiasi terhadap Kepala Desa Limboro dan Kepala Dusun Lima, PML yakni Ibu Suharyanti dan PPL Ibu Maslian yang mendukung penuh proses ini. Jembatan keberhasilan Regsosek ini berjalan dan berhasil sebab penduduk dusun yang terjaring dalam waktu singkat sejumlah 130 KK dengan estimasi total 500-an jiwa dengan pendekatan (sampai penulis mengunjungi desa) yang humanis. Mendata nama, tahun dan tempat lahir, luas lantai bangunan, luas tanah, jenis lantai, jenis dinding, sumber air utama, totalnya bila melihat kuesioner,

termasuk dalam 80-an pertanyaan yang menyangkut keadaan sosial dan ekonomi setiap satuan kepala rumah tangga yang sangat beragam keadaannya. Tergabung dalam empat kelompok besar, yakni keterangan tempat, petugas, perumahan, dan sosial ekonomi. Setiap survei harus diperlihatkan titik koordinat pendataan, yakni *geotagging* dan foto empat penjurus sisi rumah beserta atap, lantai, dan dinding. Penggunaan aplikasi *geotagging* ini membawa sedikit kendala, sebab di Dusun Lima, sinyal Telkomsel, XL, dan Indosat tidak terlampau kuat membuat petugas pasti bertemu di pusat desa/balai desa/wilayah dengan sinyal ponsel yang stabil.

Teknologi di satu sisi mempermudah penggalian informasi dengan foto empat penjurus rumah maka akan terlihat secara jelas kondisi faktual sosial ekonomi masyarakat. Salah satu contoh kejadian atau hal yang bila tidak ada teknologi akan bermasalah di lapangan, yaitu mengategorikan kondisi rumah responden, misalnya warga memiliki rumah berdinding dan berlantaikan batu, tetapi warga menjadi pengangguran yang dikarenakan faktor usia dan tenaga. Rumah keluarga ini seperti itu pun karena bantuan bedah rumah sebesar Rp50-an juta dari Pemerintah Kabupaten Donggala. Rumah keluarga ini hancur akibat gempa dan tsunami tahun 2018 lalu. Peran PPL dan PML serta ketua satuan lingkungan setempat (SLS) menjadi sangat vital. Kebijakan petugas menilai, mengamati, dan mendalami keadaan sosial warga yang dijadikan argumen dasar untuk menggolongkan seseorang masuk ke dalam kelompok mana, menjadi sangat krusial.

Apabila merujuk pada keterangan Bapak Eman Juman, Kepala Dusun Lima, sering kali masyarakat enggan bicara kepemilikan ternak dan pohon kelapa. Apabila seseorang punya ternak, dianggap tidak perlu lagi mendapatkan bantuan. Pemahaman semacam itu tentu tidak memiliki dasar sebab dalam survei ini masih banyak hal yang harus tergambarkan dalam sensus. Untungnya, di tempat yang penulis datang, penulis merasakan ketulusan dan sikap pantang menyerah yang dilakukan oleh seluruh petugas PPL dan PML dalam memberikan data dan melakukan penilaian. Saat penulis mengonfirmasi dengan Koseka di Dusun Lima, yakni Hidayat, kunci dari keakuratan data

adalah kemauan, kejujuran, dan komunikasi yang baik. Hal ini, dalam tataran kontrol, sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor BPS saat berkonsultasi dengan Bupati. Saat itu, Bupati menginstruksikan agar camat selaku kepala pemerintahan sesuai dengan penjenjangannya tidak boleh melakukan ketidakjujuran soal data. Pemerintah harus berusaha mendorong warganya untuk mengatakan apa pun secara jujur dan tulus.

Dengan data yang valid, kegiatan Regsosek ini pastinya akan membawa manfaat bagi pembangunan Kabupaten Donggala, terutama di Desa Limboro. Misalnya, BPJS yang sumber pembiayaannya dari daerah, banyak yang tidak dapat digunakan karena data yang tidak tepat sasaran. Pelajaran yang dapat dipetik dalam program Regsosek tahun 2022 ini adalah sebuah proses pencacahan menembus batas geografi yang bertujuan menyediakan satu data tentang masyarakat yang belum sejahtera.

D. Berharap di Antara Setiap Kesempatan Pendataan

Pendataan Awal Regsosek secara khusus adalah untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (BPS, 2022). Artinya, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dimulai dari tangan para petugas pendata. Berdasarkan informasi Bapak Agus Kepala Kantor BPS Kabupaten Donggala, sebelumnya terdapat ketidakjelasan dan keterlambatan informasi dari pemerintah pusat terkait dengan kegiatan Regsosek ini. Akibatnya, BPS Provinsi Sulawesi Tengah sempat mengira bahwa kegiatan Regsosek ini dibatalkan mengingat waktu yang sempit. Dengan kondisi demikian, proses perekrutan mitra dan petugas lapangan diserahkan ke BPS kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS sendiri tidak memiliki wewenang untuk menyimpan dan mendiseminasikan data tersebut karena wewenang tersebut menjadi milik Bappenas. BPS hanya berharap *output* dari hasil pencacahan ini digunakan sebagai

acuan dalam pengambilan keputusan terkait program-program perlindungan sosial. Pada dasarnya, kegiatan ini secara umum di-koordinasikan oleh fungsi sosial BPS, tetapi besarnya kebutuhan dalam kegiatan Regsosek mengakibatkan semua pegawai diwajibkan terlibat dalam kegiatan ini.

Tantangan utama dalam kegiatan Regsosek ini adalah pendeknya waktu dan minimnya persiapan sehingga dalam perjalanannya terjadi beberapa perubahan, baik itu konsep dan definisi maupun beban tugas lapangan. Terdapat aplikasi baru yang harus diunduh petugas lapangan di tengah-tengah proses pendataan untuk mendukung laporan sehingga hal tersebut membuat petugas PPL mengunjungi kembali beberapa kepala keluarga dan mengulangi pendataan. Proses rekrutmen pekerja lapangan sebagian besar mengandalkan mitra yang pernah bekerja sama dengan kegiatan BPS sebelumnya mengingat waktu persiapan kegiatan yang hanya sebulan. Secara keseluruhan, ada 509 petugas lapangan yang terpilih, terdiri dari Koseka, PML, dan PPL. Kendala di lapangan sebagian besar merupakan tantangan yang berasal dari alam, seperti pegunungan, tempat terpencil, dan cuaca yang tidak menentu. Adapun kendala dalam Regsosek ini juga datang dari penduduk, yaitu waktu pelaksanaan sebab para penduduk sebagian besar berada di kebun di siang hari. Oleh karena itu, survei dilakukan pada malam hari.

Dalam proses persiapan dan pelaksanaannya, koordinasi dan komunikasi dilakukan secara berjenjang di mulai dari SLS, di mana data orang yang dicacah minimal 1 SLS yang mencapai 250 keluarga. Selanjutnya, PPL memberi laporan ke PML, Koseka ke BPS Kabupaten Kota, ke BPS Provinsi hingga Pusat.

Sebelum kegiatan Regsosek 2022, menurut penuturan Kepala Desa Limboro, instruksi telah diberikan oleh Bupati Donggala ke seluruh camat untuk hadir dalam sosialisasi kegiatan ini. Selain itu, Bupati juga mengeluarkan surat edaran untuk kelancaran kegiatan Regsosek sebagai tanda bukti dukungan pemerintah daerah. Di dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti. Namun, pada proses pendataan, ada beberapa warga masyarakat yang enggan

menjawab jujur terkait dengan kepemilikan, seperti ternak, kebun, dan kendaraan bermotor. Persoalan ini dapat terselesaikan ketika PPL dan PML serta kepala dusun telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Petugas dapat menyimpulkan status warga terdata secara akurat, jujur, dan terverifikasi berjenjang sehingga penilaian data status warga tersebut akan bersifat objektif. Ketidakjujuran warga rata-rata didorong oleh harapan bahwa dengan pendataan Regsosek nantinya berbagai bantuan dapat diterima oleh warga. Masyarakat pada akhirnya akan berpura-pura miskin sebagaimana kelompok sasaran yang ditarget.

Salah satu tantangan ataupun permasalahan krusial di Dusun Lima sebagai lokasi penelitian, yaitu sulitnya sinyal internet. Keadaan ini disikapi dengan opsi mengganti *provider* jaringan, meskipun bukan jaminan sinyal akan tersedia. Foto, pengunggahan dokumen, dan *geotagging* yang dilakukan sering kali ter-*delay* karena jaringan yang tersedia sangat terbatas. Menurut pantauan Bapak Hidayat selaku Koseka, kondisi kurang baiknya sinyal tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi antara PPL, PML, dan Koseka dengan pertemuan tatap muka. Sulitnya sinyal akan menyebabkan proses unggah dan *geotagging* akan bermasalah.

Secara faktual, permasalahan yang menarik untuk dicermati terjadi saat menentukan keluarga yang masuk kategori 1 (sangat miskin) dan kategori 2 (miskin). Beberapa petugas lapangan dibantu kepala dusun beberapa kali melakukan verifikasi ulang dan pengecekan langsung ke lapangan untuk menentukan kategori secara adil dan benar. Sebagian besar penduduk di Apumpae memiliki pekerjaan sebagai buruh panjat kelapa, buruh perkebunan, kuli, dan pekerjaan kasar lainnya. Tidak ditemui pekerja kantoran dan PNS di dusun ini. Pendidikan bukanlah prioritas bagi warga, meskipun sudah digratiskan oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan yang rendah, setara SD (bahkan tidak lulus). Tidak ada moda transportasi umum yang menghubungkan Donggala dan desa sampai ke dusun sehingga warga memiliki mobilitasnya terbatas, termasuk dalam mencari kerja dan mencari ilmu (sekolah). Sarana dan prasarana umum masih

sangat minim, hanya terdapat satu posyandu, sementara sekolah SD dan SMP terdekat berjarak 2 km.

Kecamatan Banawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan sosial, khususnya kemiskinan yang masih tinggi. Keadaan ini tersirat jelas di Desa Limboro, di mana tiga dari lima dusun masih perlu mendapatkan perhatian khusus terkait upaya pengentasan kemiskinan. Tiga dusun itu ialah Dusun Satu, Dusun Empat, dan Dusun Lima. Tingkat pendidikan penduduk rendah (terutama di pelosok perdesaan). Masyarakat yang sebagian dikategorikan rawan miskin, mudah sekali jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem dikarenakan masalah-masalah sosial dan bencana, seperti pandemi, krisis ekonomi, bencana gempa, dan tsunami. Pada diskusi dengan Kepala Desa Limboro, yakni Mohammad Kifli tergambar bahwa proses kegiatan Regsosek dapat dibilang lancar karena “didukung” oleh keadaan penduduknya.

Saat pengamatan ini dilakukan, progres yang didapat petugas di lapangan sudah mencapai 60–70%. Hambatan yang dihadapi tidak ada yang besar, hanya beberapa PPL yang memiliki progres pendataan yang lamban. Selain itu, beberapa petugas mengalami masalah kesehatan sehingga tidak maksimal dalam bekerja. Kemiskinan sangat sulit untuk diatasi karena menurut Kepala Desa, kemiskinan yang ada di Desa Limboro ini merupakan kemiskinan kultural dan struktural sehingga perlu strategi pengentasan kemiskinan yang tidak biasa.

Selain persoalan substansi pendataan, perlu disadari bahwa kegiatan Regsosek merupakan kegiatan kolaborasi antara beberapa kementerian dan BPS. Sekalipun demikian, BPS, baik itu pusat maupun daerah, pada kegiatan Regsosek hanya bertugas dalam melakukan pengumpulan data dan penginputan. Data hasil entri kemudian akan disimpan dalam *database* Bappenas untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Keadaan ini tentu menjadi kendala karena BPS tidak menjadi pemangku data utamanya. Harapan ke depannya, ada satu data nasional yang terkonfirmasi, tentunya setelah mendapatkan validasi secara faktual dan dijadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan terkait isu-isu kemiskinan dan kerentanan sosial.

E. Menjadi Dia yang Berperan atas Nama Lembaga

Mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022, BPS melakukan kegiatan Pendataan Awal Regsosek tahun 2022 di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini sendiri bertujuan membangun sistem *database* seluruh penduduk Indonesia yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang akan dihubungkan dengan data induk kependudukan maupun *database* lainnya (BPS, 2022), baik itu di tingkat desa/kelurahan hingga pada tingkat nasional. Secara keseluruhan, model pendataan awal Regsosek 2022 dilakukan dengan metode sensus. Artinya, petugas pendataan (PPL) dan petugas pemeriksa (PML) langsung mengunjungi rumah per rumah tanpa memandang status ekonomi dan sosial.

BPS meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mendukung program ini. Menindaklanjuti hal tersebut, jajaran pemerintah daerah tidak tinggal diam. Mulai dari gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, dan lurah hingga ketua RT, secara serentak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendataan awal Regsosek. Sebagai upaya sosialisasi awal, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mendukung kegiatan Regsosek 2022, yang dilanjutkan dengan SE dari seluruh bupati dan wali kota, yang bunyinya adalah perintah dari bupati untuk mengumpulkan camat di masing-masing wilayahnya. Setelah itu, para camat kemudian meneruskan kepada lembaga dan unit pemerintahan yang lebih kecil di bawahnya, seperti kepala desa dan kepala dusun, untuk turut serta berpartisipasi menyukseskan dan mengawal kegiatan Regsosek 2022.

Berbicara mengenai program sosialisasi yang dilakukan dalam rangka menyukseskan Regsosek, sejauh ini program sosialisasi dilakukan secara satu arah dengan sistem *top down* melalui surat edaran ini dapat dikatakan berhasil, setidaknya hal itulah yang terjadi di Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Seperti yang kepala desa tuturkan, sosialisasi oleh perangkat pemerintah desa tersebut dilakukan hingga SLS di dusun-dusun dan berjalan



Foto: Arditya (2022)

Gambar 6.4 Kegiatan Koordinasi di Desa Limboro

dengan lancar dengan tidak adanya penolakan yang berarti dari warga masyarakat.

Selain model sosialisasi, desa ini juga melakukan berbagai upaya lain untuk memperlancar jalannya proses pendataan awal Regsosek 2022. Acara pengajian merupakan salah satu cara yang digunakan untuk sosialisasi dalam program yang dikoordinatori oleh BPS ini. Para petugas enumerator yang telah ditunjuk selanjutnya dipanggil untuk ikut berpartisipasi sebagai narasumber dalam rangkaian acara sosialisasi. Kegiatan koordinasi dilakukan secara rutin oleh para petugas pendata (Gambar 6.4). Secara umum, materi sosialisasi program Regsosek ke masyarakat adalah dengan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada warga, mulai dari tujuan program hingga bagaimana tata cara pengumpulan datanya di lapangan. Masyarakat diimbau untuk bersedia dan mendukung program ini dengan menjawab pertanyaan survei secara jujur. Kejujuran memang ditekankan sebagai salah satu topik di sini karena berdasarkan pengalaman terdahulu, yaitu banyak warga yang enggan memberikan jawaban yang jujur, terutama terkait dengan kepemilikan harta benda dan pengeluaran. Lebih lanjut lagi, sosialisasi yang dilakukan pihak Desa Limboro tidak hanya terbatas kepada kegiatan keagamaan semata, tetapi juga merambah kepada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang ada di masyarakat, seperti melalui kegiatan posyandu.

Selain itu, pendekatan kultural juga dilakukan untuk melanggengkan kegiatan Regsosek tahun 2022 ini. Secara umum, seperti yang telah diketahui khalayak ramai bahwa dalam implementasi sebuah kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah di tingkat masyarakat, sosialisasi tidak cukup hanya didukung dari sisi pemerintah saja. Dibutuhkan elemen lain untuk mendukung sebuah kebijakan atau program, seperti halnya kegiatan Regsosek ini. Peran tokoh desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pendataan dinilai sangat penting untuk wilayah perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional terkait senioritas dan penokohan. Hal inilah yang terjadi pada Dusun Lima Apumpae, di mana pelibatan kepala dusun dalam kegiatan Regsosek dinilai sangat krusial.

Usaha Bapak Eman Juman sebagai Kepala Dusun (kadus) turut serta dalam menyukseskan program Regsosek di dusunnya, sangat besar. Betapa tidak, meskipun kondisi fisiknya tidak terlalu prima dikarenakan masih dalam proses penyembuhan pascaoperasi kantung kemih, dia tetap begitu rajin mendampingi petugas lapangan untuk melakukan verifikasi pendataan penduduk, terutama baik itu yang tergolong miskin maupun yang sangat miskin. Verifikasi ulang beberapa kali beliau lakukan agar mendapatkan hasil pendataan yang seakurat dan seadil mungkin.

Seorang pemimpin seperti Eman sering kali memainkan peranan yang penting dalam melancarkan sebuah program kebijakan. Sudah sangat jelas bahwa kepemimpinan yang berdasarkan komitmen tinggi, melibatkan masyarakat secara menyeluruh, disertai dengan aturan yang dibuat melalui konsensus dan partisipasi aktif masyarakat, merupakan komponen penting dari suksesnya sebuah program dan kebijakan, di sini dicontohkan adalah kegiatan pendataan Regsosek. Sebelum kegiatan Regsosek dimulai, Eman beserta kepala dusun lainnya sudah terlebih dahulu di-*briefing* terkait dengan kegiatan ini. Pemetaan sederhana pun juga dilakukan untuk melihat data awal penduduk untuk memudahkan pendataan. Verifikasi pengategorian

masyarakat juga dilakukan secara terbuka dan *bottom up* dengan melibatkan kadus dan petugas lapangan.

Secara keseluruhan, upaya Eman Juman boleh dikatakan telah berhasil mengawal Regsosek di dusunnya dikarenakan proses pendataan berjalan dengan cepat dan lancar, tanpa hambatan apapun kecuali cuaca dan medan yang cukup berat. Bahkan, saking lancarnya, proses pendataan Regsosek di dusunnya sudah selesai dalam kurun waktu kurang dari 15 hari pelaksanaan. Kesuksesan ini tentu saja tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Keberhasilan ini dilakukan bersama PPL setempat yang bernama Maslian. Penunjukan Maslian, seorang wanita tangguh asli Dusun Apumpae, tidak lepas dari peran Eman sebagai Kadus. Dia bersama perangkat desa, menaruh harapan tinggi seiring dengan diberikannya posisi petugas lapangan kepada seorang wanita. Dia merasa petugas wanita sebagai PPL akan lebih dimudahkan dalam proses pendataan dan lebih diterima oleh masyarakat. Ditambah lagi, dalam dirinya sebagai wanita, juga akan membawa serta isu-isu sensitif, seperti kepedulian terhadap lingkungan maupun kesetaraan gender.

Salah satu akar kemiskinan di dusun ini secara khusus dan di perdesaan di Indonesia secara umum, menurut penulis, adalah masyarakat di perdesaan sering kali sangat tergantung kepada laki-laki dalam mencari nafkah. Wanita biasanya hanya bertugas mengurus urusan domestik rumah tangga tanpa memberikan kontribusi keuangan yang berarti untuk keluarganya. Dalam banyak kasus, penghasilan suami sangat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Jika hal ini diteruskan, susah sekali untuk sebuah keluarga dapat keluar dari garis kemiskinan. Beberapa program pemerintah terkait dengan pemberdayaan wanita melalui usaha industri rumahan dan kegiatan produktif lainnya sudah dilakukan di beberapa tempat, namun untuk Dusun Apumpae, tidak ditemukan program tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam kemajuan di masyarakat desa ini. Maka dari itu, perlu perspektif gender untuk mengurai permasalahan kemiskinan di Dusun Apumpae maupun daerah lainnya. Dipilihnya

seorang wanita sebagai petugas PPL di sini merupakan keputusan Eman yang sangat tepat.

Sebagai tokoh yang dihormati masyarakat sekitar, Eman Juman sangat mendukung kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022 ini. Pada dasarnya, memperbaiki daerah perdesaan sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa di mana pun desa itu berada. Dia menyadari bahwa dusun di mana dirinya tinggal memiliki kondisi yang memprihatinkan, terutama di sektor pendidikan. Banyaknya anak putus sekolah dan bernasib kurang lebih sama mirisnya dengan generasi pendahulunya dalam mencari penghidupan, membuat Eman merasa harus ada perubahan di dusun ini agar dapat keluar dari lingkaran setan yang bernama kemiskinan.

Eman berkaca pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki pendidikan yang rendah dan hanya bekerja sebagai buruh kasar, seperti buruh bangunan, perkebunan, pelabuhan, hingga pemanjat kelapa. Oleh karena itu, dari kegiatan Regsosek ini, dia mengharapkan pemerintah di masa depan memiliki solusi yang tepat bagi dusunnya agar dapat keluar dari lembah hitam yang bernama pendidikan rendah, masyarakatnya menjadi pekerja murah, dan kemiskinan yang tinggi. Sebagai pemimpin dusun, Eman berusaha mencari jalan keluar agar masyarakat sadar arti pentingnya pendidikan dan kesehatan. Meskipun sampai sekarang masih belum mendapatkan titik terang untuk mendorong orang-orang di sekitarnya agar lebih memahami tentang arti pentingnya pendidikan, namun hal terkecil yang dapat dilakukannya saat ini adalah dengan memberi contoh yang nyata pada keluarganya, yaitu dengan membina anaknya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Hal itu tentu saja bukan hanya omong kosong belaka. Saat ini, anak sulungnya tengah duduk di bangku kuliah di sebuah universitas di Kota Palu. Kelak, dia berharap bahwa anaknya dapat membawa perubahan, tidak hanya untuk keluarga kecilnya, tetapi juga untuk masyarakat Dusun Lima Apumpae tentang arti pentingnya sebuah pendidikan.

F. Maslian dan Suharyanti yang Melindungi: *Life Story Pendata*

Ibu Suharyanti mendedikasikan waktunya untuk membantu suami beliau yang mendapat amanah sebagai Kepala Desa Limboro. Beliau menceritakan mengenai kondisi desa dan latar belakang penduduk desa. Desa Limboro merupakan area yang rentan terhadap banjir dan gempa bumi. Desa dengan luas 661 ha ini mempunyai sejarah banjir yang dimulai pada tahun 1962. Selain banjir, gempa bumi juga terjadi di desa ini. Kejadian gempa pada tahun 2018 telah berdampak pada rusaknya 25% infrastruktur desa, rumah ibadah, dan hunian warga. Penduduk Desa Limboro berjumlah sekitar 598 jiwa/KK. Mayoritas penduduk desa berusia 25 sampai 30 tahun, dan diikuti kelompok usia dengan rentang yaitu 50–55 tahun. Latar belakang pendidikan masyarakat umumnya menamatkan sekolah pada tingkat SD dan dengan jumlah yang lebih rendah pada tingkat SMP.

Desa Limboro berjarak kurang lebih 17 km dari pusat Kota Donggala dan 45 km dari Kota Palu. Meskipun hanya belasan kilometer dari Kota Donggala, PPL dan PML memerlukan perjuangan yang cukup besar untuk mencapai desa ini, terkhusus bagi petugas yang menggunakan kendaraan bermotor. Petugas pendata lapangan bersedia melaksanakan tugas Regsosek untuk input data masyarakat secara riil.

Proses Regsosek tentunya perlu dilaksanakan sebaik mungkin agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan Regsosek diawali dengan perekrutan petugas pendata yaitu PPL dan PML. Fungsi PPL dan PML cukup *urgent* karena petugas lapangan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan data yang valid. Kriteria petugas lapangan disesuaikan dengan kebutuhan pendataan sehingga kompetensi dan domisili petugas lapangan menjadi syarat utama yang dipertimbangkan dalam proses seleksi PPL dan PML. Dalam pelaksanaan Regsosek di salah satu dusun di Desa Limboro, setiap PPL dan PML wajib berkomunikasi, berkoordinasi, dan konsultasi dengan kepala dusun. Apabila di lapangan terdapat kendala dan tidak dapat

diselesaikan di lapangan, Koseka di kecamatan wajib turun tangan dan memeriksa akurasi data serta melakukan konfirmasi kepada kepala dusun. Secara sistematis, kegiatan ini sudah menggunakan aplikasi yang memudahkan petugas walaupun terdapat beberapa kendala di lapangan. Pertama, adanya kendala sinyal yang menyulitkan proses *geotagging*. Kedua, adanya penolakan warga terkait pengambilan gambar/foto kondisi rumah warga. Kedua kendala tersebut cukup menghambat kerja petugas lapangan.

Pendataan Regsosek juga memberikan informasi kepada penulis mengenai sejarah luas lahan pohon kelapa warga yang ternyata telah diwariskan secara turun temurun. Ada pula informasi mengenai kontrak terhadap hasil panen pohon kelapa. Pohon kelapa yang telah berbuah tidak dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh pemilik pohon karena telah menjadi hak milik orang lain. Pihak lain yang memegang kontrak pohon dapat memanfaatkan hasil pohon kelapa termasuk batang kayunya sejak pohon dialihkan haknya hingga pohon tersebut mati.

Kenyataan ini sudah berlangsung lama dan berlangsung dari generasi ke generasi. Ibu kepala desa juga menyatakan bahwa beliau memiliki beberapa pohon kelapa yang terdampak kontraktual semacam ini. Biaya satu butir kelapa hanya berkisar Rp1.000,00, sementara upah buruh pemetikan satu pohon Rp3.000,00. Kondisi ini jelas menyulitkan warga, tetapi mereka hanya dapat pasrah dan menerima keadaan. Bukti proses kontrak pohon sulit ditemukan karena tidak ada yang dapat memberikan bukti bagaimana kontrak ini terjadi, baik dokumen maupun latar belakang sejarahnya.

Kembali berbicara mengenai petugas lapangan sebagai ujung tombak pendataan, dengan waktu yang singkat, pihak BPS Donggala memutuskan untuk mengajak sebagian besar mitra yang pernah bekerja sama dengan kegiatan BPS sebelumnya. Mitra yang berpengalaman diharapkan akan mempermudah proses pelatihan yang hanya dilakukan secara singkat selama dua hari. Pelatihan umum yang dilakukan untuk PPL terkait tata cara pengisian kuesioner, tata cara dan teknik wawancara, serta tata cara menghadapi kesulitan di lapangan.

Setelah proses pelatihan, pihak BPS Donggala melalui Koseka di masing-masing kecamatan mulai menentukan petugas enumerator dengan domisili yang sesuai dengan lokasi SLS agar pendataan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien, terutama untuk proses *probing*. Salah satu petugas PPL yang terpilih adalah Maslian. Beliau mengetahui kegiatan Regsosek ini dari mitra statistik. Beliau kemudian mendapat rekomendasi dari pemerintah Desa Limboro dan Kepala Dusun Lima Apumpae untuk menjadi salah satu enumerator. Rekomendasi tersebut tidaklah datang begitu saja, sebelumnya Maslian sudah aktif menjadi mitra BPS Donggala dan terlibat dalam berbagai kegiatan pendataan, seperti; Sensus BKKBN, Sensus Penduduk Statistik, dan Sensus Sistem Informasi Desa (SID). Dengan berbagai pengalaman di bidang survei terdahulu, Maslian kemudian menjadi pilihan yang tepat di tengah waktu yang sempit.

Maslian, atau biasa dipanggil dengan Lian, adalah satu dari tiga PPL yang ada di Desa Limboro. Saat ini usianya menginjak 26 tahun dan terhitung menjadi PPL termuda di desa ini jika dibandingkan PPL yang lain. Maslian merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dengan nama ayahnya adalah Mastulu, sedangkan ibunya adalah Maslida. Saat ini Lian sudah menikah dan dikaruniai seorang anak berusia 4 tahun. Suami beliau adalah seorang buruh pikul semen. Dahulu, suaminya merupakan pegawai honorer di Dinas Perikanan. Namun, karena honor yang diperoleh tidak pasti, suami beliau memilih untuk berhenti dan menjadi buruh dengan penghasilan setiap hari. Lian dan keluarga kecilnya kini tinggal di Dusun Lima Apumpae di rumah orang tuanya. Dalam kesehariannya, Lian adalah seorang ibu rumah tangga, yang selain mengurus rumah, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial desa sebagai kader kesehatan di posyandu balita, posyandu lansia, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Maslian juga sering diminta bantuan oleh berbagai instansi pemerintah, baik lingkup dusun maupun desa, hingga kecamatan untuk keperluan berbagai pendataan penduduk ataupun sosialisasi berbagai program pemerintah. Kisah Lian menjadi seorang mitra BPS dimulai pada tahun 2018 melalui program pendataan sensus penduduk. Beliau

sebelumnya aktif pada program sosial dan pemberdayaan masyarakat, salah satunya BKKBN. Kegiatan ini menjadikan beliau sebagai pihak yang diperhatikan oleh pemerintah desa dan direkomendasikan oleh perangkat desa setempat untuk menjadi mitra dan dipercaya oleh BPS.

Kehidupan Maslian sebelum menikah dapat dikatakan penuh liku tantangan. Ketika baru saja lulus dari bangku SMK, ayahnya meninggal dunia sehingga beliau menjadi tulang punggung keluarga. Ayah beliau adalah seorang sopir truk pengangkut kopra, sedangkan ibu beliau membuka usaha kopi tumbuk yang dapat dikatakan cukup viral pada masanya. Namun, usaha tersebut tidak berlangsung lama karena ketiadaan modal dan kalah saing dengan usaha sejenis lainnya. Ibu beliau kemudian beralih membuka usaha roti bakar. Saat Lian berumur 12 tahun, beliau mulai membantu ibunya untuk menjual roti bakar di sekitaran kampung Dusun Lima Apumpae. Namun, sekali lagi, usaha tersebut tidak bertahan lama dan harus berhenti pada tahun 2011. Usaha ini tidak bertahan dipengaruhi oleh kondisi ayah beliau yang mulai sakit. Ibunya fokus merawat ayahnya dan Lian sendiri belajar untuk mencari pendapatan demi melanjutkan pendidikan.

Maslian bercerita tentang pengalaman pendidikannya saat bersekolah di SD yang dirasakan cukup baik dibandingkan saat SMP, di mana ayah beliau mulai jatuh sakit. Impiannya di ambang kehancuran, antara berhenti sekolah dan memilih bekerja membantu orang tua atau melanjutkan pendidikannya. Dengan tekad yang bulat untuk maju bersama pendidikan dan meraih mimpi setinggi-tingginya, pada saat itu juga Lian memutuskan untuk tetap bersekolah. Ketidakberdayaan sang ayah karena sakit membuat Lian harus menempuh sekolah SMP dengan jalan kaki sejauh 2,5 km pulang pergi. Namun, hal ini sama sekali tidak menyurutkan tekad Lian untuk tetap sekolah dan sekaligus mencari uang untuk biaya sekolahnya. Lian melakukan berbagai pekerjaan seperti membuka usaha berdagang dan bekerja sama dengan ibu kantin sekolah. Lian juga bekerja serabutan dengan mencari keluarga yang mempunyai kebun luas di mana, setiap hari setelah pulang sekolah, dia pergi mencari apa saja yang ada di kebun

tersebut yang dapat dijual ke pasar. Sedari kecil, dia sudah dipaksa untuk berpikir secara dewasa, bahwa kondisi keluarganya tidaklah dalam situasi yang baik-baik saja sehingga sebisa mungkin tidak membebankan biaya sekolah kepada orang tuanya. Lian mampu membeli buku-buku LKS sekolah dan tentu saja mendapatkan uang jajan hasil jerih payah sendiri. Lian sangat paham, dia harus mandiri sedari dini karena saat itu dari kedua orang tuanya, satu-satunya yang bekerja tinggallah ibunya, dan yang ditanggung ibunya saat itu bukan hanya dia, melainkan juga ada adiknya yang masih kecil dan tentu saja ayahnya yang sedang berbaring lemah karena sakit.

Dengan berbagai rintangan yang harus dilalui, akhirnya Lian mampu untuk menamatkan sekolah SMP-nya. Ketika Lian berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA/SMK, pada saat itu juga ibunya melarang keras karena terbentur dengan biaya. Ibunya kemudian memaksa agar Lian bekerja saja sebagai pembantu rumah tangga di Kota Surabaya. Tentu saja hal tersebut Lian tolak mentah-mentah karena teguh pendiriannya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Agar dapat restu dari ibunya, dia berjanji kepadanya untuk dapat membiayai sekolahnya sendiri tanpa membebani orang tua. Cita-citanya sebenarnya cukup sederhana, saat itu Lian hanya ingin suatu saat dia dapat mengoperasikan komputer atau laptop karena di dusunnya tidak ada penduduk yang dapat mengoperasikan alat tersebut. Lian berusaha mencari peluang kerja apa pun yang dapat dia dikerjakan setelah pulang sekolah untuk membiayai pendidikannya. Selama duduk di bangku SMK, Lian bekerja serabutan dengan berbagai jenis pekerjaan, di antaranya sebagai penjaga kios toko kelontong, bekerja sebagai pembantu dengan mengurus rumah tangga, mencuci pakaian, dan pekerjaan sejenis lainnya.

Lian bekerja sembari bersekolah. Lian bahkan harus menempuh jarak 13 km untuk ke SMK dari rumahnya. Lian beruntung memiliki teman yang sering memberikan tumpangan ke sekolah. Selain itu, pada saat duduk di bangku SMK, terkadang dia juga naik bus sekolah secara “gratis” karena sopirnya merupakan kenalan almarhum sang ayah. Aktivitas sekolah yang padat ditambah pekerjaan serabutan yang

tidak kenal lelah dan jarak sekolah yang panjang dilalui Lian hampir setiap harinya. Namun ironisnya, bahkan setelah kerja keras banting tulang dengan hampir setiap hari pulang malam, biaya sekolah pada akhirnya masih belum tercukupi. Penyesalan Lian sampai sekarang adalah Lian belum dapat menebus satu buah kalung ibunya yang beratnya sekitar 1,2 gram yang digadaikan untuk biaya sekolahnya. Sungguh tidak mudah menjadi Lian, untuk membagi waktu antara belajar dan bekerja. Aktivitas dari pagi hingga malam membuat tubuh dan pikirannya lelah dan letih. Berangkat dari hal tersebut, hampir semua tugas sekolah pada akhirnya hanya dikerjakan di sela-sela waktu ketika di sekolah. Rutinitas itu pun dia jalani hingga lulus SMK. Dengan usaha keras yang tidak mengkhianati, Maslian akhirnya lulus SMK tanpa catatan yang jelek. Setelah lulus, dengan kondisi ekonomi yang belum membaik, Lian dijodohkan dengan kenalan ibunya yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Lian menolak karena saat itu hanya ingin fokus untuk berusaha membangkitkan perekonomian keluarga terlebih dahulu sebelum menikah dan tidak akan meninggalkan ibunya dalam keadaan sulit.

Sepeninggalan ayahnya pada tahun 2015 dan setelah menolak perjodohan, otomatis Lian menjadi tulang punggung keluarga. Lian pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk bekerja membiayai pendidikan adiknya. Lian sempat melamar untuk menjadi honorer di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPTD CAPIL) Banawa Tengah, dan keberuntungannya karena Lian diterima untuk bekerja, meskipun dengan gaji seadanya. Gaji Lian awalnya sekitar Rp200 ribu per bulan pada tahun 2014–2018. Namun, jumlah penuh gaji tersebut baru diterima tiga atau enam bulan sekali. Berkat usaha kerasnya, Lian mampu untuk menyekolahkan adiknya hingga lulus SMA. Setelah adiknya lulus SMA, Lian pun berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih layak agar dapat mendorong adiknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S-1). Menurutnya, pendidikan itu sangat penting. Lian melihat di dusunnya, kondisi pendidikan sangatlah memprihatinkan karena saat ini masih banyak sekali anak-anak

yang lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah dengan alasan utamanya adalah karena persoalan perekonomian keluarga yang serba kekurangan dan dibarengi niat untuk membantu ekonomi keluarga serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat. Dia ingin adiknya kelak menjadi orang sukses dengan pendidikan yang dimilikinya. Namun sayang, sampai sekarang Lian belum mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mimpi untuk menyekolahkan adiknya hingga sarjana pupuslah sudah.

Setelah adiknya lulus SMA dan dirasa sudah mampu hidup mandiri, pada Desember 2017, Lian melangsungkan pernikahan dengan pria yang dicintainya. Sedikit demi sedikit beban tanggungannya pun terasa ringan karena adiknya telah mandiri dan bertepatan saat itu juga dia mendapatkan bantuan suntikan dana UMKM dari pemerintah senilai Rp2.400.000,00. Lian mampu membuka usaha berjalan pulsa yang berjalan hingga sekarang. Keinginan Maslian untuk terus maju dan belajar tidak kunjung surut. Lian menambah pengetahuan dan wawasan terkait keadaan sosial, ekonomi, dan kesehatan penduduk di dusun tempat dia tinggal. Lian selalu aktif dalam kegiatan pembinaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni menjadi kader posyandu, petugas enumerator, dan lain sebagainya. Saat ini, di Dusun Lima Apumpae sendiri, Maslian dikenal sebagai warga desa yang dekat dengan pemerintah desa. Masyarakat menaruh rasa hormat kepada Maslian karena pekerjaannya yang dirasa seperti jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa maupun kecamatan.

Buah dari kerja keras Lian selama ini dalam memperjuangkan pendidikan sedikit demi sedikit mulai tampak, terlihat dari berbagai pendapat masyarakat di desanya tentang dirinya. Kegiatan Regsosek juga membuat warga dusun makin memercayai dirinya sebagai sosok yang dengan senang hati membantu masyarakat dan juga ulet dalam bekerja. Menurut Lian, kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022 ini merupakan kegiatan yang sangat baik karena mendata kondisi sosial dan ekonomi penduduk secara keseluruhan, terutama di daerah perdesaan. Selain itu, tujuan dan hasil dari pendataan ini nantinya

dapat dijadikan acuan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program-program sosial dan program pengembangan desa untuk menjadikan desa yang lebih berdaya dan maju.

Ketetapan hati seorang petugas Regsosek untuk menyajikan data yang akurat serta terpercaya menjadikan survei ini membawa serta suara perubahan. Berkaca pada penduduk Dusun Lima Apumpae, masih banyak warga yang membutuhkan bantuan pemerintah secara berkesinambungan, contohnya adalah ibu Zubaidah yang berusia 38 tahun, perempuan tangguh tersebut memiliki dua orang putra yang masih bersekolah di kelas 2 dan kelas 4 sekolah dasar. Kondisi ekonomi keluarga Ibu Zubaidah tidak begitu baik dan diperparah oleh sang suami yang pergi entah ke mana. Ibu Zubaidah tinggal di dalam rumah kayu beratap daun kelapa kering, berlantai tanah dengan kisaran luas hanya 12 m². Dalam kesehariannya, Ibu Zubaidah berjualan es batu dan sirop di sekolah dasar yang jaraknya kurang lebih 3 sampai 4 kilometer. Beliau memperoleh Rp300 ribu per bulan dan membutuhkan Rp20.000,00 sampai Rp25.000,00 untuk keperluan harian. Kondisi ini diterima Ibu Zubaidah dengan tetap menjalankan aktivitasnya untuk masa depan anak-anak beliau agar lebih baik. Ibu Zubaidah mengungkapkan bahwa kepala dusunnya sangat proaktif untuk menyertakan beliau ke dalam berbagai bantuan pemerintah. Mayoritas warga memang mengharapkan bantuan tersebut karena kondisi masyarakat memang sangat membutuhkan.

Selanjutnya, kisah Bapak Lapaiso, seorang guru mengaji di kampung Dusun Lima Apumpae. Beliau hidup dengan istri dan ibu yang berusia 91 tahun yang sudah tidak dapat berkomunikasi secara aktif dan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Kehidupan ekonomi keluarga ini hanya ditunjang oleh honorarium beliau sebagai guru mengaji, yakni 1 juta per bulan. Satu petak rumahnya sudah direnovasi pascagempa, sementara satu petak kecil lainnya masih beralaskan tanah beratapkan rumbia. Bapak ini pun, secara fisik, sudah tidak kuat untuk beraktivitas, hanya melakukan salat, azan, dan membaca Al-Qur'an setiap saat di musala terdekat yang menjadi rutinitasnya. Keluarga beliau telah mendapatkan bantuan PKH dari Kementerian

Sosial lewat Dinas Sosial Kabupaten Donggala. Bantuan-bantuan tersebut diharapkan karena kondisi keluarga memang termasuk keluarga prasejahtera. Honorarium guru mengaji tersebut tidak dapat dicairkan setiap bulan. Beliau menerima gaji secara berkala, baik tiga bulan atau empat bulan sekali.

G. Hidup Berharap Bantuan: *Life Story* Keluarga Didata

Dusun Lima Apumpae merupakan suatu daerah dengan bentang alam yang tidak hanya indah, tetapi juga mampu memengaruhi cara hidup dan kemampuan penduduknya dalam beradaptasi untuk mencari nafkah. Dataran tinggi dengan jalan berkelok-kelok yang sesekali diselingi dengan rumput dan ilalang yang tampak meranggas meskipun sudah memasuki periode musim hujan menjadi kesan pertama ketika penulis memasuki dusun ini. Jalan yang sepi akan lalu-lalang kendaraan dan jumlah rumah penduduk yang tidak padat menandakan penghuni di sini tidaklah terlalu banyak, hanya terdapat 130 kepala keluarga berdasarkan data program pencacahan terakhir. Suasana siang hari di dusun ini juga sangat sepi dikarenakan ditinggal banyak penghuninya untuk bekerja di ladang. Penduduk sebagian besar merupakan pekerja lepas (buruh) di bidang perkebunan, pertanian, maupun pertambangan, sedangkan sebagian lagi memilih untuk mengadu nasib sebagai nelayan tradisional. Beberapa dari warga



Foto: Tedi (2022)

Gambar 6.5 Kondisi Faktual dan *Life Story* Warga Dusun Lima Apumpae

juga didapati bekerja sebagai buruh kasar di pelabuhan-pelabuhan terdekat. Dengan bentang alam yang eksotis, di sepanjang perjalanan penulis menemukan puluhan hingga ratusan pohon kelapa di segala penjuru. Bahkan di sudut-sudut terpencil di dusun ini, penulis masih dapat menemukan pohon-pohon kelapa berdiri dengan tegaknya. Sungguh potensi alam yang luar biasa bila dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan bersama. Namun, tampaknya hal tersebut mustahil untuk terjadi, setidaknya dalam jangka waktu yang dekat karena sampai sekarang eksploitasi alam di dusun tersebut hanya dinikmati oleh segelintir golongan tertentu saja.

Salah satu potret keluarga yang penulis temui ialah keluarga Bapak Nudin. Beliau tinggal di rumah sederhana berdinding bata ringan yang sudah dipoles dengan semen dan dicat warna krem (Gambar 6.5). Rumah ini dihuni oleh tiga orang, yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang putri (Bapak Nudin, Ibu Yuliana, dan putri mereka, Nima). Rumah tersebut diketahui merupakan rumah bantuan dari pemerintah ketika tempat tinggal mereka hancur akibat bencana alam gempa dan tsunami yang melanda Palu-Donggala pada tahun 2018 silam. Dahulu, rumah milik keluarga Bapak Nudin merupakan jenis hunian sapo khas Sulawesi Tengah yang semi permanen dengan dindingnya terbuat dari kayu pohon kelapa dan beratapkan jerami. Dengan kondisi demikian, selain mendapatkan bantuan stimulus gempa sebesar Rp10 juta, keluarga ini juga mendapatkan bantuan rumah kumuh senilai 7,5 juta rupiah pada tahun 2018 dan 2019 yang lalu. Rumah bantuan gempa ini pada dasarnya adalah hunian sangat sederhana yang belum selesai, atau dengan kata lain, mengusung konsep rumah tumbuh. Namun, empat tahun berselang pascabencana yang meluluhlantakkan Donggala, rumah bantuan ini tidak mengalami perubahan sama sekali dan tidak tumbuh. Bangunan rumah Bapak Nudin hanya memiliki tiga ruangan utama. Tampak salah satu ruangan besar digunakan sebagai ruang keluarga, sedangkan ruangan lainnya berfungsi baik sebagai kamar maupun dapur. Perabotan di rumah ini juga terlihat tidak ada yang mencolok atau bahkan tidak ada sama sekali dan tidak ada ornamen yang menghiasi dinding rumah ini, seperti lukisan, jam dinding, dan

semacamnya. Seluruh isi rumah memberikan kesan sangat minimalis atau mungkin kemiskinan adalah kata yang lebih tepat digunakan dalam menggambarkan kondisi ini.

Rumah ini tidak memiliki kamar mandi dan toilet, padahal hal tersebut merupakan salah satu unsur esensial agar dapat dikatakan sebagai sebuah rumah yang layak huni. Secara umum, bantuan rumah dari pemerintah tidak menyertakan fasilitas kamar mandi dan toilet dalam pembangunannya sehingga sampai sekarang jika ingin mandi, warga harus pergi ke tempat sanak saudara yang lebih berada. Selain itu, ketiadaan kamar mandi menyebabkan banyak warga didapati masih pergi ke semak-semak di hutan yang terletak di belakang rumah mereka untuk buang air besar. Dalam bahasa Kaili, aktivitas ini disebut dengan *motutai ghi vunggu* atau lebih dikenal dengan istilah *gumbu-gumbu*.

Kemiskinan dan kelaparan seolah-olah selalu hidup berdampingan bersama keluarga ini. Tentu saja keluarga Pak Nudin tidak ingin hidup seperti ini. Semenjak masih kecil, Bapak Nudin sudah bekerja membantu orang tuanya untuk mencari nafkah dengan menjadi buruh pemanjat kelapa. Sekolah bukanlah prioritasnya, lebih tepatnya pendidikan bukanlah prioritas utama bagi penduduk di dusun ini dari zaman dahulu hingga zaman sekarang.

Hal ini diperkuat dengan data yang mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 130 keluarga di Dusun Lima Apumpae ini merupakan lulusan SD. Bahkan, jika ditelisik lebih dalam lagi, sebagian besar dari warga tidak lulus sekolah dasar. Bapak Nudin tumbuh dan berkembang dengan berbagai keterbatasan pilihan karier dan pekerjaan. Bapak Nudin seakan-akan mewarisi keadaan generasi sebelumnya yang memiliki kehidupan tidak menguntungkan. Ada satu cerita ketidakberuntungan keluarga ini ketika, pada tahun 2011, salah satu dinas melakukan pelebaran jalan untuk pariwisata yang melewati tanah miliknya, namun Bapak Nudin tidak mendapatkan uang ganti rugi dari tanah yang digunakan untuk proyek negara itu. Pada kenyataannya, Bapak Nudin hanya diberi ganti rugi sebesar jumlah pohon kelapa yang berada di lahannya. Bapak Nudin tidak diberikan ganti rugi sepeser pun untuk lahannya.

Sejarah kemalangan tersebut membuat keluarga kecil ini sekarang harus puas hidup dengan sebidang tanah yang kecil. Dengan sumber daya yang terbatas, kurangnya pengalaman dan pendidikan, serta ancaman bencana alam, mengakibatkan hanya ada sedikit alasan di benak keluarga ini untuk berharap akan masa depan yang cerah dan lebih baik. Pesimisme dalam hidup sangat terlihat jelas dari beberapa jawaban yang diberikan. Namun, tampaknya situasi seperti ini tidak dapat dihindari. Jika ditelisik kembali pada silsilah keluarga Pak Nudin, ditemukan bahwa ia dan nenek moyangnya telah hidup dalam kemiskinan sedari awal. Keluarga Pak Nudin adalah contoh bagaimana kemiskinan dapat dilanggengkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sama halnya seperti harta warisan, seperti tanah, rumah, maupun bentuk harta lainnya. Keluarga ini telah terperosok dalam kemiskinan selama beberapa generasi dan sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Keluarga ini bahkan tidak lagi dikejutkan oleh rasa lapar dan dahaga yang melanda setiap harinya.

Kemalangan keluarga ini terus berlanjut. Saat Bapak Nudin (70 tahun) sedang bekerja keras sebagai buruh nelayan pada tahun 2021, beliau pertama kali merasakan gejala sakit. Beliau merasakan penglihatannya makin lama makin melemah, yang akhirnya menyebabkan saraf-saraf di matanya menjadi sulit untuk bergerak. Dilihat dari gejalanya, kemungkinan besar itu adalah penyakit katarak. Selain itu, beliau menderita sakit pikun dan penyakit menua lainnya yang menyiksa sepanjang siang dan malam. Beliau mengalami penurunan berat badan terus-menerus. Wajahnya yang tirus dengan cekungan mata yang dalam, menandakan beliau sedang tidak baik-baik saja. Beliau hanya berbaring lemah, saat ini itulah aktivitas utama dan sehari-harinya. Dengan kondisi demikian, pendapatan keluarga menjadi menurun secara signifikan sebagai akibat langsung dari sakit yang diderita Bapak Nudin. Bapak Nudin sebagai tulang punggung keluarga dapat disamakan dengan fondasi sebuah bangunan, dan ketika fondasinya runtuh, bangunan itu secara keseluruhan juga akan ikut runtuh. Jika demikian, lalu bagaimana keluarga Pak Nudin dapat menangani situasi yang tidak baik ini? Yuliana, istri beliau, mulai berbicara dalam bahasa Kaili Unde tentang bagaimana keluarga ini

berusaha bertahan hidup untuk mengatasi berbagai masalah hidup yang ada.

Yuliana adalah satu-satunya anggota keluarga yang sedikit dapat membaca dan menulis karena beliau sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SD. Beliau mengatakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga ini mengandalkan program bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, seperti program bantuan sosial sembako Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga ini mendapatkan bantuan PKH tidak lebih dari Rp100 ribu setiap bulannya, Namun, program bantuan sembako BPNT sudah tidak lagi diterima sejak Januari 2022. Alasan di balik berhentinya bantuan ini kemungkinan besar karena pengategorisasian kemiskinan di daerah tersebut. Keluarga Nudin sebelumnya merupakan keluarga yang masuk kategori 2 atau miskin. Hal ini didasarkan kepada kepemilikan properti berupa rumah tinggal. Memang harus diakui untuk kondisi rumah, keluarga Nudin sudah tidak lagi tinggal di rumah yang semipermanen jika dibandingkan beberapa keluarga lain yang masih tinggal di rumah semipermanen. Namun, perlu dicatat juga, rumah tersebut merupakan rumah bantuan gempa dan tsunami dari pemerintah, bukan dibangun atas biaya sendiri.

Keadaan ekonomi keluarga Nudin tidaklah lebih baik dari kondisi sebelum mendapatkan bantuan stimulan gempa. Keluarga ini tetap masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sinilah PPL berperan besar dalam melihat kondisi nyata di lapangan. Setelah berdiskusi dengan PML, Koseka, perangkat dusun, dan desa, akhirnya keluarga Bapak Nudin diganti dari kategori miskin ke kategori sangat miskin. Dari hal ini, bantuan pemerintah pada masa yang akan datang diharapkan dapat lebih tepat sasaran, terutama untuk keluarga ini.

Ibu Yuliana sebenarnya tidak ingin berpangku tangan saja melihat keadaan keluarganya. Wanita yang berusia genap 53 pada tahun ini, sudah berusaha mencari penghasilan untuk keluarganya agar tetap dapat bertahan hidup. Namun, sepertinya terdapat belunggu yang kuat mencengkeram erat kedua kakinya untuk tidak bekerja dan tetap

bertahan di rumah saja. Suaminya saat ini sedang terbaring lemah karena sakit sehingga hampir mustahil untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa penjagaan dan bantuan orang lain.

Anak beliau, Nima, meskipun telah berusia dewasa (30 tahun), belum dapat hidup secara mandiri. Nima, putri satu-satunya keluarga ini, sejak kecil divonis akan tumbuh berbeda dengan anak-anak yang lainnya karena menderita gangguan keterbelakangan mental. Dia takut ketika melihat orang banyak dan tidak dapat bersosialisasi seperti kebanyakan anak sebayanya. Sedari kecil, Nima tidak memiliki teman bermain karena sifatnya yang sangat introver. Keterbatasan IQ yang dimiliki Nima akhirnya membuat dia tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sarana SD untuk anak berkebutuhan khusus yang jauh dari dusun membuat biaya sekolah membengkak, belum lagi biaya sekolah lain yang harus dibayarkan, dan keterbatasan tenaga pendidik untuk anak-anak “spesial” di daerah ini, membuat Nima dan keluarga mengubur mimpi indahinya untuk dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan keadaannya.

Ibu Yuliana tentu saja menaruh kesedihan mendalam terhadap kondisi anaknya. Harapan akan masa depan juga tebersit di dalam benaknya, semoga kelak dia dapat mengasuh anaknya secara baik dan mengharapakan kehidupan anaknya nanti dapat lebih layak lagi daripada kehidupan yang telah dijalannya serta para generasi sebelumnya. Salah satu kekhawatiran yang selalu mengganggu pikirannya setiap malam sebelum tidur adalah saat Ibu Yuliana tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mencarikan pengganti dirinya sebagai teman anaknya kelak. Ibu Yuliana khawatir, mengingat anaknya yang berkebutuhan khusus akan hidup sebatang kara dan kesepian. Namun apa daya, dengan situasi yang demikian sulit, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Sesekali keluarga ini juga dibantu oleh tetangga untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, kadang Ibu Yuliana turun ke bibir pantai menjelang para nelayan pulang dari menjaring tangkapannya untuk mengemis, meminta belas kasih para nelayan agar diberikan sekadar satu atau dua ekor ikan untuk dijadikan lauk pauk. Tentu saja, anak-

nya juga turut serta menjadi pengemis bersamanya. Sekali lagi, ketidakberuntungan masih menghinggapi keluarga ini, penyakit yang melumpuhkan sang pencari nafkah, ditambah dengan generasi baru yang memiliki kebutuhan khusus untuk melanjutkan hidup, makin menjerumuskan keluarga Bapak Nudin ke dalam palung yang dalam bernama kemiskinan ekstrem.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan makin menunjukkan tren positif, sejauh ini, sepertinya tidak dirasakan masyarakat hingga ke pelosok negeri, seperti halnya di Dusun Lima Apumpae ini. Sejauh keluarga Bapak Nudin ketahui, beliau merasakan negara hadir dalam hidupnya adalah ketika bencana gempa bumi dan tsunami melanda Palu-Donggala. Selebihnya, negara ada dalam bentuk bantuan tunai yang menurut penulis tidak menumbuhkan produktivitas. Kehadiran BPJS pada kurun waktu belakangan mungkin menjadi salah satu angin segar dari hadirnya negara untuk masyarakat miskin seperti keluarga ini. Berbicara mengenai kegiatan pendataan awal Regsosek, keluarga ini sangat terbuka untuk semua kegiatan pemerintah semacam ini. Keluarga Nudin tidak menolak, meskipun tidak mengerti maksud dan tujuannya. Keluarga ini hanya berpikir akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah dari kegiatan pendataan ini. Kebiasaan ini tentu saja tidak sehat mengingat ketergantungan masyarakat miskin seperti keluarga Bapak Nudin terhadap bantuan pemerintah sangatlah besar.

Kemiskinan kultural dan kebijakan bantuan yang instan, akan memberikan efek ganda dalam menimbulkan ketergantungan dan kemalasan, baik pihak masyarakat maupun pemerintah. Dalam benak masyarakat, kegiatan Regsosek ini adalah pendataan untuk keluarga miskin yang nantinya akan mendapatkan bantuan pemerintah, tidak ada hal lainnya. Masyarakat tidak mengerti, atau tidak peduli lebih tepatnya, akan pentingnya pendataan Regsosek ini dalam upaya menjadikannya satu data yang terintegrasi di masa depan bagi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kesehatan, hingga ekonomi. Mentalitas penduduk seperti di atas, yakni peminta-minta bukanlah dibentuk secara instan. Banyak faktor yang diyakini turut

berkontribusi dalam pembentukannya, tidak terbatas pada eksploitasi yang dimulai dari masa penjajahan Belanda, aktivitas kapitalisme yang menghisap kekayaan alam tanpa peduli lingkungan dan warga lokal sekitar hingga korupsi di berbagai level pemerintahan, dan tentu saja hasil dari kebijakan yang sekadar memanjakan saja tanpa merangsang masyarakat untuk berpikir kritis atau untuk mengembangkan diri. Ketiadaan ruang untuk berkembang membuat kebijakan-kebijakan pemerintah ini seakan-akan menjadi tidak ada artinya.

H. Mendata: Merumuskan Suatu Kekuatan Negara

Dusun Lima Apumpae memberikan sebuah pelajaran bahwasanya program sosial kemasyarakatan pemerintah harus didasarkan pada data faktual dan kondisi yang sebenarnya. Dusun ini menjadi contoh bahwa realitas kemiskinan itu ada, nyata, dan perlu penanganan serius oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Donggala. Komitmen sederhana sudah dimulai dari Kepala Dusun, Kepala Desa, serta Camat Banawa Tengah. Pendataan Regsosek Tahun 2022 tidak membatasi pelaksanaan kegiatan pada beberapa sektor saja sehingga fenomena kemiskinan faktual dan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat dapat diungkap secara akuntabel, proporsional, dan bertanggung jawab.

Dusun Lima Apumpae menjadi wilayah prioritas untuk mengurai kasus kemiskinan sebab banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat wilayah dusun ini menjadi lebih berdaya. Perhatian setidaknya pada pemenuhan air bersih dan fasilitas MCK yang wajib menjadi prioritas utama karena dua hal tersebut menjadi kebutuhan utama warga dan berdampak pada kesehatan. Selain itu, kualitas pendidikan dan SDM lainnya juga perlu menjadi perhatian lebih mengingat banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi yang tentu saja akan menghasilkan kualitas SDM yang rendah.

Perangkat desa dan warga wajib memiliki kesadaran bahwa lingkungannya memiliki potensi alam, baik darat maupun laut, yang

kurang dimanfaatkan secara optimal. Contoh nyata adalah kurangnya wawasan warga masyarakat terkait dengan nilai tambah komoditas kelapa. Kondisi ini hendaknya menjadi prioritas pembenahan sebab puluhan ribu pohon kelapa di sini bukan lagi menjadi hak dari pemilik tanah atau warga, melainkan sudah dikuasai oleh para tengkulak. Sejarah hukum kontraktual merugikan pemilik tanaman kelapa hendaknya menjadi perhatian utama segenap perangkat Desa Limboro. Setiap pemilik pohon kelapa diharapkan mampu mengolahnya sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan.

Relasi yang baik setiap jenjang pemerintahan di level bawah ditandai dengan lancarnya kegiatan pendataan awal Regsosek 2022. Pendataan benar adanya dan tindakan dari pemerintah setempat yang tidak ragu untuk menyatakan warga yang harus diberi kompensasi, bantuan, dan diberdayakan, merupakan contoh relasi yang sehat. Realitas semacam ini bukan aib bagi pemerintah di level bawah, namun dipandang sebagai masalah yang harus dipecahkan bersama-sama sehingga pemerintah sangat diharapkan memiliki kepekaan sosial yang baik.

Kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022 di Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, secara umum berlangsung lancar. Data yang diperoleh lewat kuesioner yang diunggah ke aplikasi yang dilakukan PPL di Dusun Lima Apumpae akan dilakukan verifikasi pertama di level dusun dan desa oleh PML. Secara berjenjang, setelah PML memverifikasi secara faktual, konfirmasi secara acak maupun sistematis dilakukan petugas Koseka di level kecamatan. Data yang ada, baik dari aplikasi maupun dari kuesioner, kemudian akan tervalidasi. Saat *stakeholder*, yakni BPS dan pemerintah daerah, melakukan pemeriksaan secara bersama, diharapkan data *real time* yang tervalidasi dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dan yang paling penting dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan di Kabupaten Donggala maupun di *database* yang terintegrasi dalam skala nasional.

Daftar Pustaka

- Abubakar, I., Yantu, M., & Asih, D. N. (2013). Kinerja kelembagaan pemasaran kakao biji tingkat petani perdesaan Sulawesi Tengah: Kasus Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *Agrotekbis*, 1(1), 74–80.
- Basaria, R., Setiawan, A., & Sedyono, E. (2018). Penentuan luas wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan metode poligon dengan bantuan Google Earth. *Jurnal Mercumatika: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika*, 3(1), 9–22. <https://doi.org/10.26486/jm.v3i1.606>
- BPS. (2022). Pendataan awal REGSOSEK 2022: Buku 3 pedoman pendataan lapangan. Badan Pusat Statistik.
- Kaunang, I. R. B., Haliadi, dan Rabani, L. O. (2016). *Jaringan maritim Indonesia: Sejarah toponim kota pantai di Sulawesi*. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Desa Limboro. (2022). *Monografi Desa Limboro 2022*, 1.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Donggala. (2022). https://jdih.donggala.go.id/uploads/produk_hukum/Produk-Hukum-2-1676429016.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54410/pp-no-71-tahun-1999>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) (Perpu) No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara. (1964). <https://jdihn.go.id/files/4/1964ppu002.pdf>
- Randall, S., Coast, E., Antoine, P., Compaore, N., Dial, F. B., Fanghanel, A., Gning, S. B., Golaz, V., & Wandera, S. O. (2015). UN census “households” and local interpretations in Africa since independence. *SAGE*, 5(2). <https://doi.org/10.1177/2158244015589353>.

- Syawal, I. (2019). Syekh Abdullah Raqi: Orang Minangkabau penyebar Islam di Palu pada abad XVII. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 5(2), 189–212. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.131>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah. (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39665/uu-no-27-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi Tengah. (1959). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51529/uu-no-29-tahun-1959>